

BAB III

STRATEGI IMT-GT DALAM WISATA HALAL

Michael Porter mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menentukan keunggulan dari kompetitif suatu perusahaan, daerah, atau negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut diantaranya adalah faktor kondisi (*factor condition*), faktor permintaan (*demand condition*), keberadaan industri pendukung dan berkaitan (*supportive and related industries*), strategi, struktur, dan persaingan perusahaan (*firm strategy, structure, and rivalry*), selain keempat faktor tersebut juga didukung oleh faktor eksternal yang terdiri atas peran pemerintah dan terdapatnya kesempatan.¹

Faktor produksi akan berperan tergantung pada bagaimana ia digunakan dan dikembangkan. Dalam lingkup IMT-GT, Indonesia dan Thailand memiliki kekayaan alam serta populasi penduduk yang lebih besar dibandingkan dengan Malaysia. Dengan banyaknya tenaga kerja yang dimiliki negara tetangganya tersebut, Malaysia mendapatkan keuntungan dengan mengimpor tenaga kerja terlatih guna meningkatkan produksi produk dan jasa halal. Dengan kondisi dan permintaan (*demand condition*) dapat meningkatkan kompetitivitas jika adanya tuntutan konsumen yang semakin tinggi di suatu pariwisata sehingga akan mendorong negara untuk terus mengembangkan kompetitifnya melalui kebijakan inovasi dari wisata halal.

¹ Development of Halal Industry. Diakses dari <http://www.miti.gov.my>. Pada 28 juli 2021, 9:25 Wib.

Selain itu jika Kerjasama dalam wisata halal serta kebijakan-kebijakan pendukung yang berkaitan akan semakin optimal jika hubungan kerjasama IMT-GT tersebut semakin erat dan negara yang menjalankan kerjasama akan memusatkan diri dalam suatu kawasan sehingga akan menghemat biaya dan bisa memanfaatkan fasilitas bersama. Kemudian rasa kompetitif semakin meningkat, yang akan mendorong terjadinya kebijakan dalam mendukung wisata halal. Wisata halal sangat menjaga kualitas mutu dan menghindari sesuatu yang dapat menghilangkan kehalalan suatu produk atau jasa. Kerjasama yang baik dari setiap negara terkait akan mengoptimalkan kinerja dari kebijakan wisata halal terutama jika negara-negara tersebut tergabung dalam kerjasama wisata halal.

Berdasarkan data world population review, jumlah penduduk muslim di tanah air pada 2010 warga muslim di Indonesai sebanyak 87,18%, sedangkan lainnya beragama Kristen (6,96%), Katolik (2,91%,) Hindu (1,69), Budha (0,72) dan sisanya menganut agama yang lain.² Berdasarkan data jiwa penduduk muslim di atas penulis dapat menyimpulkan Indonesia akan memanfaatkan potensi yang ada dan terus berupaya mengembangkan konsep wisata halal. Tentunya hal ini menjadi lebih strategis dengan letak geografis dan Indonesia menjadi salah satu anggota IMT-GT yang pada isu kali ini di angkat karena adanya hubungan kerjasama wisata halal (Halal Tourism) diantaranya memiliki sebuah acuan untuk mendukung konsep wisata halal tersebut di tiga negara ataupun kebijakan-kebijakan lainnya.

²Badan Pusat Statistik. 2010. Statistik Indonesia 2010. Badan Pusat Statistik: Jakarta. Pada 28 juli 2021, 9:25 wib.

3.1. Kebijakan Wisata Halal Negara Indonesia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dan juga Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.³ Dengan peraturan undang-undang Indonesia yang terdapat di atas dapat di simpulkan bahwa aturan yang ada menjadi acuan pokok keberlangsungan wisata halal negara Indonesia menjadi kuat dengan aturan undang-undang yang ada dan kebijakan-kebijakan Indonesia terkait produk halal menjadikan negara Indonesia dapat memberikan kejelasan yang benar kepada wisatawan muslim baik lokal maupun internasional.

3.1.1. Aceh

Pertemuan IMT-GT ke 23, Ministerial Meeting ke 24, Senior Officials Meeting ke 14, Chief Ministers dan Governors Forum di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Kamis 28 Septemer 2017.⁴ Berdasarkan data sumber yang di dapat bahwasannya dalam pertemuan tersebut delegasi Aceh yaitu wakil gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah, MT memaparkan mengenai potensi pariwisata halal di Aceh, wisata halal yang semakin pesat dalam pembahasan dunia terkhususnya di Asia. Aceh merupakan wilayah yang penting untuk di prioritaskan dalam perkembangan wisata halal karena Aceh memiliki dasar keagamaan yang tinggi selain itu juga Aceh adalah salah satu wilayah Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah penganut agama Islam.

³ Susilawati, 2019. *Regulasi dan penerapan pariwisata halal di Indonesia*. Diakses dari <http://digilib.uinsgd.ac.id/29700/>. Pada 22 Oktober 2021, 15:13 Wib.

⁴ Humas Aceh, 2017. "Wagub paparkan potensi pariwisata halal di hadapan delegasi IMT-GT". Diakses dari <https://mirror.acehprov.go.id/news/read/2017/09/28/4551/wagub-paparkan-potensi-pariwisata-halal-dihadapan-delegasi-imt-gt.html>. Pada 09 Juli 2021, 11:31.



Gambar 3.1 Wagub paparkan potensi pariwisata Halal di hadapan Delegasi IMT-GT

Sumber <https://www.ajnn.net/news/wagub-paparkan-potensi-pariwisata-halal-dihadapan-delegasi-imt-gt/index.html>

Pasar wisata halal sendiri semakin pesat di seluruh dunia, terutama di Asia. Oleh karena itu IMT GT menjadi sangat penting dalam mempromosikan pariwisata halal di Aceh. Hal yang menjadi nilai lebih untuk pengembangan wisata halal tidak lain karena Aceh mayoritas penduduknya adalah muslim dan memiliki nilai keagamaan yang tinggi dalam menjalani keseharian.⁵ Dari latar belakang Aceh yang merupakan wilayah dengan penduduk muslim lebih besar menjadikan kemudahan dan keseriusan IMT-GT dapat dengan mudah mempromosikan ke kancah Internasional yang menjadikan nilai lebih dari Aceh sebagai Wisata Halal. Selain itu juga pasar wisata halal aceh sendiri menjadi lebih istimewa untuk dikembangkan.

⁵ Redaksi, 2017. "Wagub paparkan potensi pariwisata Halal di hadapan Delegasi IMT-GT". Diakses dari <https://www.ajnn.net/news/wagub-paparkan-potensi-pariwisata-halal-dihadapan-delegasi-imt-gt/index.html>. Pada 09 Juli 2021, 11:31.

“Selain untuk meningkatkan jumlah turis, pariwisata halal juga berperan penting dalam peningkatan ekonomi. Dalam produk halal dan jasa, peningkatan tersebut bisa dilakukan dengan memberikan kualitas terbaik dan standarisasi sertifikasi halal,”⁶

3.1.2. Sumatera Barat

Sejak ditandatanganinya komitmen pariwisata halal Sumbar pada 2017 hingga saat ini, baru 21 restoran dan rumah makan di Sumbar yang memiliki sertifikasi halal. Empat diantaranya nya pengurusannya secara mandiri, dan sisanya disubsidi pemerintah Provinsi Sumatera Barat.⁷ Berdasarkan data di atas bahwasannya Pemerintah Sumatera Barat memiliki tekad serius dalam membantu perkembangan pariwisata halal dengan memberikan fasilitas sertifikasi halal di sebuah beberapa restoran yang memenuhi syarat bahwa restoran tersebut layak untuk di berikan sertifikat halal tersebut. dengan demikian Sumatera Barat merupakan wilayah yang memiliki fokus nya dalam wisata halal.

3.1.3. Sumatera Selatan

Sumatera Selatan mendorong pengembangan wisata syariah di Kabupaten/Kota untuk membangkitkan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19.⁸ Berdasarkan data yang di dapat bahwasannya Sumatera Selatan mendorong kalangan perbangkan dalam menunjang wisata halal di masa

⁶ Redaksi, 2017. “Wagub paparkan potensi pariwisata Halal di hadapan Delegasi IMT-GT”. Diakses dari <https://www.ajnn.net/news/wagub-paparkan-potensi-pariwisata-halal-dihadapan-delegasi-imt-gt/index.html>. Pada 09 Juli 2021, 11:31.

⁷ Gatra, 2019. “Perkembangan Pariwisata Sumbar Masih Lamban”. Diakses dari <https://www.gatra.com/detail/news/425870/milenial/perkembangan-pariwisata-sumbar-masih-lamban>. Pada 14 Juli 2021, 14:02 Wib.

⁸ Dolly Rosana, 2020. “Pemprov Sumsel dorong pengembangan wisata syariah di kabupaten/kota”. Diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/1693674/pemprov-sumsel-dorong-pengembangan-wisata-syariah-di-kabupaten-kota>. Pada 14 Juli 2021,

pandemik untuk kemajuan wisata, dengan kebijakan tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwasannya, bahwa perbankan di harapkan dapat berperan aktif agar bisa mendorong melalui aplikasi mobile banking-nya. Dengan begitu wisatawan dapat dengan mudah, seperti bank mandiri yang telah meluncurkan QRIS di tempat karena wisata hal ini sangat positif di tengah pandemi asalkan tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah di terapkan.

3.1.4. Kepulauan Riau

Dalam peraturan Gubernur nomor 18 tahun 2019, yang di tandatangani oleh gubernur pada 5 April 2019. Ia mengatakan pada 9 April akan menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Pariwisata Arief Yahya tentang destenasi pariwisata halal di Jakarta.⁹ Dengan penandatanganan nota kesepahaman tersebut kerjasama pariwisata khususnya di bidang wisata halal, negara yang melakukan kerjasama tersebut melihat bahwasannya Kepulauan Riau merupakan sebuah daerah yang masih memiliki bahasa aksara arab melayu dalam pendidikan khususnya. Dengan demikian ada bahasa akasara arab melayu yang masih digunakan maka hal tersebut dapat menarik wisatawan karena ada bahasa khusus yang digunakan dalam wilayah tersebut.

3.1.5. Riau

Muslim Friendly Amenities seperti halnya hotel, restoran dan lain-lain sudah mulai berkembang. Selain itu juga saat ini kerjasama dengan organisasi multinasional untuk mengembangkan infrastuktur pariwisata halal relatif mudah dilaksanakan. Oleh karenanya bukan sesuatu yang sulit bagi Indonesia jika

⁹ Christyaningsih, 2019. "Tarik wisatawan, Riau terbitan aturan Pariwisata Halal". Diakses dari <https://nasional.republika.co.id/berita/pqbfss384/gaya-hidup/travelling/19/04/08/ppn5h0459-tarik-wisatawan-riau-terbitkan-aturan-pariwisata-halal>. Pada 14 Juli 2021, 23:01 Wib.

nantinya dijadikan sebagai pusat destinasi bagi Indonesia jika nantinya dijadikan sebagai pusat destinasi bagi wisatawan muslim mancanegara. Kebijakan Muslim Friendly Amenities adalah sebuah kebijakan yang dimana masyarakat muslim yang ramah kepada wisatawan berpariwisata di Riau, kebijakan tersebut agar wisatawan lebih nyaman dan tenang ketika berpariwisata.¹⁰

Kepala dinas kebudayaan dan pariwisata Pekanbaru Hermanius mengatakan "Kriteria pariwisata halal diantaranya yakni Muslim friendly destination, Muslim visitor arrival, Acces to prayers, Muslim travelers and general safety, dining option dan halal assurance, kemudian yang terakhir Acomodation option,".¹¹ Yang artinya bahwa Kriteria dalam pariwisata halal di atas jelaskan bahwa sebuah destinasi yang ramah Muslim, dengan kedatangan pengunjung Muslim, akses alat yang mendukung untuk wisatawan muslim, selain itu juga wisatawan Muslim dan keamanan umum lebih di perhatikan, seperti dengan pilihan bersantap dengan jaminan bahwa makanan yang di dijual dan di konsumsi merupakan produk halal, kemudian yang terakhir adanya pilihan akomodasi.

3.2. Kebijakan Wisata Halal Negara Malaysia

Lembaga Penelitian Beberapa lembaga penelitian di negara-negara IMT-GT serius menangani masalah halal. Malaysia memiliki beberapa perguruan tinggi dan lembaga penelitian tentang halal. Menanggapi perkembangan industri Halal yang berkembang pesat di Malaysia, Universitas Islam Internasional Malaysia,

¹⁰ Arif Yahya, 2019. "Memiliki Potensi besar, Riau siap memacu pariwisata Halal". Diakses dari <https://www.tribunnews.com/travel/2019/04/15/memiliki-potensi-besar-riau-siap-memacu-pariwisata-halal>. Pada 15 Juli 2021, 22:49 Wib.

¹¹ Arif Gunawan, 2017. "Pekan baru siapkan regulasi pendukung pariwisata halal". Diakses dari <https://sumatra.bisnis.com/read/20171206/533/763748/pekanbaru-siapkan-regulasi-pendukung-pariwisata-halal>. Pada 15 Juli 2021, 22:49 Wib.

dengan kekuatan akademis dan penelitian serta lingkungan Islam yang kondusif telah mendirikan pusat khusus yang didedikasikan untuk industri Halal - “Pusat Penelitian Industri Halal IIUM” pada bulan Juli 2006. Sebelum lahirnya pusat ini, sudah ada kantong-kantong kegiatan yang berkaitan dengan Halal dan Industri Halal oleh staf akademik dari berbagai Kuliah. HIRCen, fokus kegiatan halal di IIUM menjadi lebih fokus dan terkoordinasi lebih baik dengan Research Management Center yang menjadi lembaga pemantau.¹²

Konsep pengembangan yang telah terbukti sukses dilaksanakan pada kepemimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pengembangan Pariwisata Halal ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain: *Pertama*, Mengedepankan dan menjaga nilai-nilai Islami dan kearifan lokal. Mengedepankan perilaku atau akhlak yang baik, yaitu baik dalam memberikan pelayanan maupun menciptakan produk wisata. *Kedua*, mengadopsi hal-hal yang baik dari sistem dan standard yang didominasi oleh peradaban Barat, sebagai contoh pelayanan prima dalam produk pariwisata, dalam mengembangkan program-program capacity building untuk peningkatan pelayanan dan produk wisata. *Ketiga*, menjalankan konsep toleransi dan market oriented. Sebagai contoh, wisatawan dari barat kemungkinan menginginkan hal-hal yang tidak selaras dengan produk wisata halal, hal tersebut tidak perlu dilarang/ dipaksakan kepada wisatawan yang tidak menginginkan. Dan harus difasilitasi pada produk wisata lainnya yang sesuai dengan wisatawan

¹² Nurul Aziza, 2020. “Halal Tourism, Certification Regulation, and Research Institute Inshigh From IMT-GT Countries: A Review: A Review”. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/347414950_Halal_Tourism_Certification_Regulation_and_Research_Institute_Inshigh_From_IMT-GT_Countries_A_Review_A_Review. Pada 16 Juli 2021, 10:39 Wib.

tersebut. Produk wisata halal harus juga disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi wisatawan Muslim dari berbagai negara yang berbeda.¹³

Selain itu juga menurut CEO Crescentraining Fazal Bahardeen yang merupakan orang terpenting dan melihat kebijakan Malaysia jalankan yang masuk dalam konsep wisata halal memaparkan wisata halal Malaysia seperti dibawah ini:

*CEO Crescentraining Fazal Bahardeen kepada AFP mengatakan, “prestasi yang di sandang Negara ini didapat melalui proses yang cukup panjang dan serius. Sentra Pariwisata Islam Malaysia gencar bersosialisasi dan mengedukasi pelaku industri pariwisata untuk memenuhi kebutuhan utama pelancong Muslim. Hal itu terlihat dari membeludaknya dapur hotel yang bersertifikat halal yang dibarangi dengan pemenuhan kebutuhan spesifik lainnya. Bukan hanya menyangkut konsumsi makanan atau minuman. Malaysia juga mulai memperhatikan layanan lain, seperti pemisah ruang kebugaran dan kolam renang antara laki-laki dan perempuan. “Pelayanan halal untuk wisatawan Muslim terus meningkat,” ujarnya.”*¹⁴

¹³ MES, 2017. “Belajar kembangkan Wisata Halaldari Malaysia”. Diakses dari <https://www.ekonomisyariah.org/6499/belajar-cara-kembangkan-wisata-halal-dari-malaysia/>. Pada 29 Juli 2021, 12:40 Wib.

¹⁴ Damanhuri zuhri ,2014. “Malaysi tujuan favorit pariwisata halal”. Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/n1n967/malaysia-tujuan-favorit-pariwisata-halal>. Pada 13 Agustus 2021, 10:36 Wib.

3.3. Kebijakan Wisata Halal Negara Thailand

Wisata halal Thailand tersebar di berbagai titik tempat. Seperti Chiang Mai di bagian utara Thailand yang memiliki *halal district*. Kemudian Bangkok yang menjadi jantung Thailand, lalu Phuket di bagian selatan. " Tak hanya restoran, *street food* juga sudah banyak yang bersertifikasi halal. Kedepannya akan lebih memperbanyak tempat ibadah dan makanan halal,"¹⁵ Kebijakan tersebut menjadi pendukung dalam Wisata Halal Thailand yang di kembangkan sebagai ke-efektif pan Negara Thailand untuk pengunjung wisatawan muslim di negara tersebut yaitu pendukung wisata halal, dengan adanya *halal district*, *street food halal*, dan tempat ibadah yang memadai di setiap tempat perbelanjaan dan tempat umum lainnya.

*CICOT is a governmental organization responsible for the certification, monitoring, and supervision of Halal products in Thailand as well as in charge with the Islamic Affairs of the Muslim Thai people. Kingdom of Thailand is an observer State of SMIIC and is being represented by CICOT together with Halal Standards Institute of Thailand (HSIT).*¹⁶ Berdasarkan data yang penulis dapat CICOT yang merupakan organisasi pemerintah yang bertanggung jawab untuk sertifikasi, pemantauan, yang bekerjasama atau berkolaborasi dengan Halal Standards Institute of Thailand (HSIT) memantau dan mendukung negara Thailand dengan kehalalan sebuah produk di Negara Thailand dengan adanya

¹⁵ Annisa mutiara Mutiara Asharini, 2019. "Wisata Halal Thailand untuk habiskan libur lebaran. Diakses dari <https://m.dream.co.id/travel/destination/wisata-halal-thailand-untuk-habiskan-libur-lebaran-190531b.html>. Pada 13 Agustus 2021, 10:36 Wib.

¹⁶ SMIIC, "Visit to CICOT, HSC-CU and HSIT". Diakses dari <https://www.smiic.org/en/content/549#:~:text=CICOT%20is%20a%20governmental%20organization,of%20the%20Muslim%20Thai%20people>. Pada 22 Oktober 2021, 10:52 Wib.

kegiatan tersebut wisatawan muslim lokal ataupun Internasional tidak perlu khawatir dengan Produk Halal yang ada di Thailand.

Halal Check-in Thailand adalah salah satu buku panduan yang berisikan daftar masjid, restoran bersertifikat halal, hotel ramah Muslim, pusat perbelanjaan dan tempat pertunjukan yang menyediakan fasilitas ibadah.¹⁷ Pernyataan tersebut dapat di simpulkan bahwa dengan inisiatif yang telah di terapkan Thailand dengan dukungan pemerintah yang mengembangkan pariwisata halal. Dengan begitu terlihat bahwa pemerintah Thailand sangat mendukung perkembangan pariwisata halal, hal ini terlaksana karena perkembangan bisnis pariwisata halal memang cukup besar. Sebagai negara non-Muslim yang di dominasi oleh agama Buddha, tentu menjadi tantangan Thailand sebagai destinasi halal yang ramah Muslim. Namun dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah, keinginan tersebut bisa terwujud. Hal ini tergambar dari berbagai laporan yang menempatkan Negara Thailand sebagai salah satu negara non-OKI yang *Muslims friendly destination*.

3.3.1 Phuket

Phuket menyelenggarakan seminar Pariwisata Halal Phuket Andaman 2018 untuk mempromosikan pariwisata dengan produk dan layanan halal.¹⁸ Bagi sebagian besar wisatawan muslim yang berpariwisata ke luar negeri tentu melihat track rakot terlebih dahulu. Apakah tempat yang akan di kunjungi memiliki

¹⁷ Abdul Rasyid, 2017. "Pariwisata Halal di Thailand". Diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2017/02/28/pariwisata-halal-di-thailand/>. Pada 22 Oktober 2021, 14:32 Wib.

¹⁸ Suara Patani, 2021. "Phuket gelar seminar Pariwisata Halal Andaman". Diakses dari <https://www.suarapatani.com/news/phuket-gelar-seminar-pariwisata-halal-andaman>. Pada 29 Juli 2021, 12:40 Wib.

fasilitas yang memadai dalam hal artian untung pengunjung wisatawan muslim sendiri. Dari sumber yang didapat bahwa provinsi Phuket melakukan sebuah seminar dalam mempromosikan produk wisata halal, dalam kegiatan tersebut tidaklah mungkin suatu kegiatan di lakukan tanpa bukti yang nyata, dengan adanya promosi dalam seminar wisata halal tersebut maka adanya sebuah kebijakan yang di jalankan Phuket dalam melangsungkan wisata halal, tentunya dengan kebijakan tersebut ada pula konsep pelayanan yang di terapkan di Provinsi Phuket.

Andaman Halal Tourism 2017 yang digelar di Hotel Metropole, Phuket. Thailand menilai wisatawan muslim dari Timur Tengah, Malaysia, Brunei Darusalam, dan Indonesia sebagai market Muslim yang potensial di sana.¹⁹ Karena bagi sebagian besar wisatawan muslim ketika melancong ke luar negeri kemudahan dalam menemukan Masjid untuk beribadah menjadi sebuah pertimbangan dalam menentukan destinasi luar Negeri yang akan di ambil. Selain itu ketersediaan Hotel halal dan Restoran halal menjadi pendukung wisatawan dalam bepergian, tersedia nya produk halal dalam sebuah wilayah pariwisata yang ada dalam negara menjadi salah satu ketertarikan wisatawan muslim dalam bepergian karena sudah tersedia nya kebutuhan hak sebagai umat islam.

¹⁹ Sri anandiati nursastri, 2017. "Mengintip 4 Hotel Halal di Phuket". Diakses dari <https://travel.kompas.com/read/2017/08/12/100500927/mengintip-4-hotel-halal-di-phuket?page=1>. Pada 22 Oktober 2021, 13:3 Wib.

3.4. Kebijakan Kerja Sama Tiga Negara

3.4.1. UKM Halal

Dalam pertemuan KTT yang dipimpin Jokowi Dodo 2019, Bangkok Kerjasama IMT-GT dalam tiga negara mendorong dalam penguatan kerja sama di bidang UMKM Halal dengan sektor-sektor tersebut maka ketiga negara dapat berorientasi ekspor maupun halal start-up.²⁰ Dengan kebijakan yang dijalankan maka tiga negara yang menjalankan kerjasama memiliki tekad dalam pengutanan dari kebijakan wisata halal yaitu dengan menjalankan kerja sama UMKM Halal di tiga negara kerja sama IMT-GT. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mempermudah wisatawan ataupun penduduk lokal muslim yang sudah pernah berkunjung maupun belum, agar ketika berbelanja tidak ragu ataupun tidak sulit ketika mencari produk halal, karena bagi orang muslim produk sangatlah sensitif dalam membeli segala sesuatu apakah barang tersebut dapat di terima atau tidak. Maka dengan adanya pengembangan Halal Start-up tersebut menjadi solusi wisatawan muslim.

Indonesia dan Negara Anggota IMT-GT lainnya tetap berkomitmen dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam cetak biru IMT-GT 2017-2021. Hingga akhir Oktober 2020, IMT-GT berhasil mencetak sebanyak 4.054 UKM Halal berorientasi ekspor. Jumlah ini melampaui target yang ditetapkan sebelumnya yaitu 3.000 UKM pada 2021, sehingga targetnya dinaikkan menjadi

²⁰ Kementerian Keuangan, 2019. "KTT IMT-GT Fokus bahas konektivitas, ekonomi inklusif dan Industri Halal". Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ktt-imt-gt-fokus-bahas-konektivitas-ekonomi-inklusif-dan-industri-halal/>. Pada 16 Juli 2021, 10:39 Wib.

7.000 UKM pada akhir 2021.²¹ Dengan kemajuan dan keberhasilan UKM halal yang melampaui target, dari tahun yang telah tertulis di atas bahwa masa pandemik pun IMT-GT mampu menyelesaikan target dan capaiannya bahkan melampaui batas. Dengan begitu kemudahan bagi masyarakat muslim dan wisatawan muslim dalam memenuhi kebutuhan ketika membeli produk yang di inginkan pun menjadi benar-benar lebih mudah.

Akhir tahun 2020, IMT-GT berhasil mencetak UKM Halal berorientasi ekspor dalam 3 negara sebanyak 4.054, awalnya imt-gt menargetkan 3.000 UKM pada 2021, pada akhirnya targetnya di naikkan menjadi 7.000 UKM pada akhir 2021.²² Dari data yang didapat penulis menyimpulkan bahwa Keberhasilan dalam mencetak UKM Halal dapat menunjang wisata halal karena tujuan dari wisata halal adalah terpenuhinya wisatawan muslim dalam berkunjung, ketika UKM Halal telah tercetak dan terpenuhi dalam suatu negara maka UKM Halal dapat menyokong berhasilnya Wisata Halal dalam negara. Wisata merupakan sebuah konsep yang dapat memudahkan wisatawan muslim dalam perjalanan selain itu, konsep ini bukan hanya bertujuan untuk wisata muslim saja akan tetapi wisata non-muslim juga dapat menikmatinya, dengan konsep ini dan terpenuhinya kebutuhan halal maka wisatawan akan merasa aman dalam berwisata.

²¹ Antara, 2020. "RI- Malaysia- Thailand cetak 4.000 UKM Halal Orientasi Ekspor". Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201126/257/1322920/ri-malaysia-thailand-cetak-4000-ukm-halal-orientasi-ekspor>. Pada 18 Juli 2021, 21:01 Wib.

²² Antara, 2020. "RI-MALAYSIA-THAILAND Cetak 4.000 UKM Halal orientasi ekspor". Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201126/257/1322920/ri-malaysia-thailand-cetak-4000-ukm-halal-orientasi-ekspor>. Pada 29 Juli 2021, 12:40 Wib.

3.4.2. Tenaga Ahli Halal

Jumlah tenaga ahli halal pada 2020 telah mencapai 59.418 tenaga ahli yang melampaui target sebesar 30.000 tenaga ahli halal dengan pertemuan virtual tersebut menunjukkan upaya ketiga negara dalam mengatasi dan beradaptasi dengan masa pandemi saat ini melalui kemajuan teknologi demi mewujudkan cita-cita dan tujuan kerjasama.²³ Artinya meskipun di masa pandemik begini tetapi IMT-GT tetap berkomitmen dengan baik dan menjalankan kerjasama dengan memperhatikan pertumbuhan kemajuan dari kerjasama yang telah di jalankan seberapa jauh kemajuan kerjasama yang telah terjalankan, dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Dengan begitu meskipun ada hambatan IMT-GT memiliki target dan langkah yang baik untuk capaian di tahun kedepan, ketika tenaga ahli terpenuhi maka tidak ragu lagi bahwa UKM Halal yang di jalankan untuk memenuhi standarisasi wisata halal dapat di percaya dalam suatu negara yang menjalankan kerjasama.

3.4.3. Pendukung Wisata Halal

Untuk menarik wisman muslim ke Tanah Air, menurut Menpar, butuh sejumlah strategi dan pelayanan yang terbaik. Ada empat tantangan yang terus dibenahi, Pertama soal akses meliputi konektivitas udara, jumlah bandara dan kapasitas tempat duduk pesawat. Selain itu, konektivitas di darat seperti stasiun, jalan, serta konektivitas laut pelabuhan kapal pesiar. Kedua, aspek komunikasi meliputi jangkauan dan dukungan fasilitas digital. Ketiga, lingkungan seperti

²³ Fathoni. "Bersama Malaysia dan Thailand, Indonesia gagas penguatan Ekonomi Halal". Diakses dari <https://uninus.ac.id/bersama-malaysia-dan-thailand-indonesia-gagas-penguatan-ekonomi-halal/>. Pada 29 Juli 2021, 12:40 Wib.

keamanan dan budaya. Terakhir, adalah layanan yang meliputi makanan halal yang sudah disertifikasi, tempat ibadah, hotel dan pengalaman unik.²⁴

Pada 9 November 2018, Menteri Transportasi Indonesia-Malaysia-Thailand menandatangani MoU tentang Revisi dan Ekspansi Konektivitas udara IMT-GT di Bangkok, kegiatan ini beriringan dengan pertemuan menteri Transportasi ASEAN Ke-24.²⁵ Dalam KTT tersebut, Aceh mengusulkan beberapa program di antara nya peningkatan konektivitas udara dari Sabang-Phuket-Krabi-Langkawi, yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas maritim, pengembangan wisata, program wisata halal, zona ekonomi khusus, program pengijauan kota. Kesepakatan tersebut telah di sepakati dan di tandatangi oleh pihak tiga negara. Kesepakatan kerjasama yang dijalankan dalam transportasi udara yaitu pembangunan bandara, bertujuan dan berpengaruh dalam program wisata halal. Dengan begitu adanya kerjasama yang di bangun dapat meng akomodasi kerjasama yang berjalan dengan baik.

Gubernur Riau, Syamsuar, menyampaikan update terkait implementasi RoRo Dumai-Malaka. *“Proyek Ro-Ro Dumai-Malaka diharapkan segera terwujud, dan dalam waktu dekat yaitu 18 September 2019 akan dilaksanakan ujicoba sandar di pelabuhan Sri Junjungan yang sudah ditunjuk sebagai pelabuhan di Dumai”* selain itu juga kata Syamsuar. *“Untuk mendukung proyek Ro-Ro ini maka kita akan percepat penyelesaian jalan tol Dumai-Pekanbaru*

²⁴ Koran sindo, 2018. “Wisata halal, Indonesia incar nomor 1 Dunia”. Diakses dari <https://travel.okezone.com/read/2018/05/22/406/1901327/wisata-halal-indonesia-incar-nomor-1-dunia>. Pada 29 Juli 2021, 12:40 Wib.

²⁵ Acehkini, 2019. “Plt Gubernur Aceh Paparkan 7 Program di KTT IMT-GT Summit di Bangkok”. Diakses dari <https://kumparan.com/acehkini/plt-gubernur-aceh-paparkan-7-program-di-ktt-imt-gt-summit-di-bangkok-1rKnJPNdAT2/full>. Pada 29 Juli 2021, 12:40 Wib.

sebagai bagian dari Tol Sumatera” lanjutnya. Proyek ke-dua yang diusulkan adalah peningkatan pariwisata dengan mengusulkan pembukaan penerbangan rute Pekanbaru-Krabi atau Pekanbaru-Johor Baru. Sementara itu, perwakilan Kepulauan Riau menyampaikan proposal kerja sama yang meliputi bidang: maritim, kerja sama technopark, pengembangan kota hijau dan kerja sama kawasan ekonomi khusus.” Kebijakan dalam pembenahan pembangunan dapat mempermudah wisatawan dalam berwisata, hal tersebut menyokong dan mendukung kerjasama Pariwisata IMT-GT dalam sektor wisata halal karena selain konsep wisata halal tentu IMT-GT juga harus memperhatikan akses pendukung menuju wilayah wisata kerja secara langsung.²⁶

3.5. Kerjasama Antar Provinsi Wilayah Kerja

Pemerintah provinsi riau melakukan Penandatanganan kerja sama dengan Raja Muda Perlis, yaitu DYT M Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail dan Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar. Dalam pemaparannya, Gubri Syamsuar mengatakan bahwa kini Provinsi Riau tengah gencar menggalakkan wisata halal. "Kami bukan hanya mengembangkan industri halal saja, namun juga muslim friendly atau muslim yang ramah," terangnya. Pada kebijakan dan kesempatan tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa kedua wilayah provinsi yang fokus terhadap kebijakan kerjasama yang telah dijalankan oleh IMT-GT pun di perkuat dengan kebijakan kerjasam ayang di jalankan oleh

²⁶ Sumber ekon, 2019. "16th IMT-GT CMGF: Indonesia Fokus pada Pengembangan Konektivitas, Pariwisata, Kota Hijau, dan Kawasan Ekonomi Khusus dalam Pertemuan Tingkat Gubernur IMT-GT". Diakses dari <https://ekon.go.id/publikasi/detail/935/16th-imt-gt-cmgf-indonesia-fokus-pada-pengembangan-konektivitas-pariwisata-kota-hijau-dan-kawasan-ekonomi-khusus-dalam-pertemuan-tingkat-gubernur-imt-gt>. Pada 29 Juli 2021, 12:40 Wib.

kedua provinsi dengan dua negara yang berbeda, dan selain itu juga pada kesempatan yang sama Perlis juga mengajak untuk bekerja sama dalam pembuatan produk muslim. Karena, kata Gubri, meski semua produk ada label halalnya, namun hal tersebut tidak dijamin kehalalannya.²⁷

Sejauh ini virus corona diyakini pertama kali muncul di China pada bulan November 2019. Pihak berwenang melaporkan kluster kasus-kasus pneumonia, yang penyebabnya tidak diketahui, ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019.²⁸ Sejak saat penyebaran virus corona menjangkit ke seluruh penjuru negeri keadaan Dunia pun sudah tidak stabil lagi. Mulai dari kesehatan, ekonomi hingga wisata pun terdampak akibat dari penyebaran wabah penyakit yang mematikan yang melumpuhkan beberapa aspek kehidupan yang begitu mengerikan dan mematikan. Dunia pun diminta agar dapat beradaptasi dengan gejolak kehidupan dunia yang baru akibat dari virus corona tersebut. Disini penulis akan memberikan data kebijakan yang ada dengan sesuai keadaan akibat dari dampak Corona.

Wisata halal merupakan sebuah konsep pariwisata yang menyediakan layanan kepada wisatawan dengan berlandaskan syari'at Islam. Beberapa tempat wisata di Indonesia mulai menerapkan konsep ini dan mendapatkan sambutan yang baik. Namun, euforia tersebut tidaklah berlangsung lama hal ini karena tiba-tiba muncul pandemi Covid 19 yang meluluh lantakkan banyak sendi

²⁷ Richarde, 2019. "Kepincut wisata halal Riau, Raja Perlis Malaysia teken kerja sama dengan Gubri". Diakses dari <https://www.oketimes.com/news/25448/kepincut-wisata-halal-riau-raja-perlis-malaysia-teken-kerja-sama-dengan-gubri.html>. Pada 29 Juli 2021, 12:40 Wib.

²⁸ Kompas, 2020. "Virus Corona diperkirakan muncul di Wuhan sejak Agustus 2019". Diakses dari <https://www.kompas.com/global/read/2020/06/09/201844870/virus-corona-diperkirakan-muncul-di-wuhan-sejak-agustus-2019?page=all>. Pada 29 Juli 2021, 12:40 Wib.

kehidupan, dan yang paling terpuak adalah dunia pariwisata karena pariwisata merupakan kegiatan wisatawan yang mengharuskan untuk tidak bepergian agar klaster virus corona tidak meyebar lebih parah lagi. Di tambah pariwisata juga merupakan kegiatan dari ekonomi karena didalamnya terdapat usaha dalam jual beli jasa atau prodak yang seketika terhenti akibat dari pandemik. Maka dari itu kenapa virus corona begitu menghantam di sektor pariwisata.

Konsep pariwisata yang tidak hanya halal, tetapi juga thoyyiban (aman), serta menjelaskan strategi yang dapat dilakukan pemerintah agar bangkit dari keterpurukan melalui sektor pariwisata. Hasil kajian menunjukkan bahwa ada lima strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam mewujudkan wisata halalan thoyyiban di Indonesia yaitu adanya sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan secara lebih masif, pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan mobilitas dan konektivitas, penerapan protokol kesehatan yang ketat, pembinaan langsung. kepada masyarakat, dan pendampingan berkelanjutan.²⁹ Pengaruh dari virus corona merupakan sebuah virus yang menghancurkan aspek pariwisata ditambah kemunculan konsep wisata halal merupakan konsep yang baru di kembangkan, efek pandemi harus memutar otak agar wisata halal tetap terus berjalan, Indonesia menerapkan kebijakan dari wisata halal di masa pandemi yaitu Wisata Halalan Thoyyiban yang artinya wisata halal yang lagi baik dengan menerapkan kebersihan dari kebijakan wisata halal.

²⁹ Anam, 2021. "Wisata Halalan Thoyyiban: Kebangkitan Pasca Pandemi Covid-19 di Indonesia". Diakses dari <http://conference.um.ac.id/index.php/esp/article/view/677>. Pada 29 Juli 2021, 12:40 Wib.